**KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**TESIS**

**OLEH**

**MIFTAHUDDIN**

**20911005/Magister Hukum**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM, PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Dalam Program Studi Hukum Program Pascasarjana**

**Universitas Dharmawangsa**

**OLEH**

**MIFTAHUDDIN**

**20911005/Magister Hukum**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Miftahuddin |
| NPM | : | 20911005 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia |

**Menyetujui,**

**Medan, 04 Juni 2022**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.**

**NIDN: 0029125702 NIDN: 0109027604**

**Penguji**

**Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H**

**NIDN:** **0113028704**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Miftahuddin |
| NPM | : | 20911005 |
| Program Studi | : | Hukum |
| Konsentrasi | : | Hukum Pidana |
| Judul | : | Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia |

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian permuatan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Program Studi Hukum Program Magister Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan, 04 Juni 2022

Saya Menyatakan

**Miftahuddin**

20911005

**ABSTRAK**

**KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Miftahuddin**

**Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**Dr. Budi Bahreisy, SH, MH**

Sudah banyak kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan telah diungkap, Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut TNI), Adapun rumusan masalah pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang?, Bagaimana mekanisme peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan TPPU?, Bagaimana kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggotaTNI?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya tidak tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer, melainkan tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam UU TPPU. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam *ius constituendum* harus dirumuskan secara lebih tegas dalam UU TPPU, agar tidak membuka ruang adanya penafsiran. Dengan tetap mempertahankan limitasi lembaga yang berwenang dalam hal melakukan penyidikan, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang termasuk kategori tindak pidana umum (non militer), tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan juga penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam ketentuan limitatif. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsurPasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa

**Kata Kunci : Kompetensi, Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang, TNI**

***ABSTRACT***

***COMPETENCY OF THE INVESTIGATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING PERFORMED BY MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY***

**MIFTAHUDDIN**

*There have been many cases of money laundering in Indonesia that have been carried out by various groups, but in its development there are several obstacles in law enforcement of money laundering crimes, including money laundering crimes committed by elements of the Indonesian National Armed Forces (hereinafter referred to as TNI), this is not just a legal assumption that has not happened or will not happen, but over time this problem is a legal reality which is a legal issue that needs to be studied and found the best solution according to law. The research method used is normative and empirical juridical research. The nature of the research used in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary and secondary data. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study, the conclusions in this study are based on theoretical studies in terms of authority, legal validity, justice based on equality before the law and also on the basis of state law politics that have been outlined, as well as viewed from the perspective of jurisdictional principles, money laundering crimes carried out by members of the TNI should not be subject to the authority of investigators in the military court environment, but subject to the authority of investigators in the general court environment as has been limitedly determined in the Money Laundering Law. The investigation into money laundering crimes carried out by members of the TNI in the ius constituendum must be formulated more firmly in the Money Laundering Law, so as not to open up space for interpretation. While maintaining the limitations of the competent institutions in terms of conducting investigations, so that members of the TNI who commit money laundering crimes which are included in the category of general crimes (non-military), are subject to the power of the general court, and investigations are also carried out by investigators in the general court environment as mentioned above. in limited terms. In the juridical analysis, the Panel of Judges in determining the provisions against the perpetrators in this case is in accordance with the elements of Article 87 paragraph (1) 2nd Jo. paragraph (2) where the judge has considered both the facts in the trial, the statements of the witnesses and the available evidence, as well as the judge's belief in making a decision which will later have a deterrent effect on the defendant, giving fear to the convict and other soldiers. so as not to commit a similar crime*

***Keywords: Competence, Investigation, Money Laundering, TNI***

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sehingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu untuk mempeoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “**Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia**”

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senanng hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, teruma sekali kepada :

1. Bapak Dr. H. Zamakhsyari Lc, MA selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Ibu Ayu Trisna Dewi SH., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
3. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dukungan, serta saran dan kritik dari awal penelitian, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. (Cand) Amiati Zuliah, SH., MH selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum.
5. Bapak Dr. Budi Bahreisy, SH, MH selaku dosen pembimbing II, yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Bapak Muhammad Nurdin dan Ibu Jauharah yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang serta berkat doa dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Buat istri tercinta Ratna Dewi dan anak-anakku tercinta Nazarullah Gilang Perdana dan Shahnaz Huzaziah yang selalu memberikan semangat sehingga selesainya tesis ini.
9. Seluruh Rekan-rekan penulis terutama bapak Mayor Chk Sri Armansyah yang telah banyak membimbing, memberi masukan dan motivasi penulis.
10. Seluruh teman-teman S2 Hukum, Penulis menyampaikan terima kasih karena telah memberikan semangat dan dorongan positif dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penlis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Besar harapan saya tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai refrensi bacaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

Medan, 04 Juni 2022

Penulis

Miftahuddin

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK i**

**ABSTRACT ii**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI v**

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang 1

B.Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 10

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 12

G. Metode Penelitian 44

1. Jenis dan Sifat Penelitian 44

2. Sumber Data Penelitian 45

3. Teknik Pengumpulan Data 46

4. Analisis Data 47

**BAB II PERTANGGUNGAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 49**

1. Pertanggungjawaban Pidana 49
2. Fakta Hukum 52

**BAB III MEKANISME PERADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 62**

A. Tahap Pelaporan 62

B. Tahap Penyidikan 67

C. Tahap Penuntutan 72

**BAB IV KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI 77**

1. Kompetensi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer 77
2. Kompetensi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 81
3. Kompetensi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 83
4. Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI 85

**BAB V PENUTUP 95**

1. Kesimpulan 95
2. Saran 96

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kejahatan dan kehidupan manusia merupakan sisi lain kehidupan yang akan terus ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Awalnya kejahatan hanya dilakukan secara tradisional atau dikenal dengan istilah kejahatan konvensional, Namun seiring berjalannya waktu dengan diimbangi oleh semakin majunya zaman dengan ciri khas berkembang pesatnya teknologi, modus operandi kejahatan mulai mengalami pergeseran darikejahatan konvensional menuju kejahatan modern.

Bila pelaku kejahatan tradisional melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi dan latar belakang intelegensia mereka yang kurang baik, maka ada bentuk lain dari kejahatan modern biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelegensia yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian yang sudah bagus, dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalahkejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan ungkapan M. Arief Amrullah yang mengatakan “kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita”.[[1]](#footnote-1)

Salah satu varian kejahatan modern yang kini menjadi *trending topic*yang menjadi sorotan di kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum adalah kejahatanpencucian uang. Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris

dikenal dengan *money laundering* merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius *(serious crime)* dan bahkan bersifat transnasional *(transnational crime)*.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara. Sifat kejahatan ini sekarang menjadi universal dan menembus batas – batas yuridiksi negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.[[2]](#footnote-2)

Pencucian uang pada intinya adalah kejahatan yang bertujuan menyamarkan uang hasil kejahatan *(dirty money)*melalui suatu proses agar seolah-olah uang hasil kejahatan tersebut tampak berasal dari cara yang sah, pencucian uang tidak lagi merupakan permasalahan nasional tetapi juga merupakan permasalahan internasional dimana karakteristik kejahatan ini tidak mengenal batas-batas negara, karena cenderung dilakukan dengan memanfaatkan jasa penyedia jasa keuangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di manca negara dan dengan didukung oleh kecanggihan teknologi dewasa ini sehingga sangatlah masuk akal bilamana jarak, batas ruang maupun waktu dapat ditembus oleh pelaku kejahatan ini, hal ini terlihat dengan fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan misalnya dengan menggunakan fasilitas transfer dana dapat mengunakan sarana *handphone,* perpindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dapat dilakukan dengan sekejap dalam hitungan detik, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan tujuan yang dikehendaki baik dalam lingkup dalam negeri ataupun mancanegara.

Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white collar crime, corporate crime, dan transnational crime*. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, money laundering dapat menjadi salahsatu bentuk dari *cyber crime*. Mengingat karakteristik *money laundering*yang demikian maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money Laundering*(selanjutnya penulis sebut dengan FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris Tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. FATF merupakan sebuah badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintahan negara-negara *to implement effective anti-money laundering programmes.*[[3]](#footnote-3)

Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan *The Forty Recomendations*sebagai standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. *The Forty Recomendations*bertitik tolak pada kerangka dasar untuk mencegah pencucian uang melalui sistem peradilan pidana, penegakkan hukum sistem keuangan, dan peraturannya serta kerjasama internasional.[[4]](#footnote-4)Kebijakan FATF ini wajib diadopsi oleh *member* dan *associate member* jika tidak maka negara tersebut akan dilabeli *Non Cooperative Countries and Territories List (NCCT’s)*.

Indonesia hingga Tahun 2002 belum mempunyai regulasi anti pencucian uang oleh karena itu menurut anggapan masyarakat internasional, Indonesia merupakan surga pencucian uang, hal ini mengundang reaksi dari internasionalkhususnya FATF, hingga pada akhirnya Pada bulan Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara berlabel NCCT’s, dampak *labeling*tersebut dapat berupa peningkatan biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau dapat juga terjadi penolakan *Letter of Credit(L/C)*yang diterbitkan perbankan negara yang terkena *counter measures*oleh negara anggota FATF.

Hal ini dapat diartikan sebuah desakan internasional kepada Indonesia agar segera membentuk regulasi anti pencucian uang, tindak lanjut atas hal tersebut pada akhirnya Indonesia melakukan kriminaslisasi terhadap kejahatan pencucian uang dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian pada Bulan Oktober tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diperbarui kembali dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya penulis sebut dengan UU TPPU).

Pada awal pembentukan regulasi anti pencucian uang dengan mengkriminalisasikan pencucian uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan khusus pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK), PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mendefiniskan, bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Efektifitas pemberantasan pencucian uang di Indonesia bermula dan berada di tangan PPATK. Untuk itu, independensi menjadi prasyarat bagi PPATK agar lebih efektif melaksanakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Independensi dimaknai sebagai kedudukan struktural PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan begitu diharapkan setiap langkah dan kebijakan yang diambil PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak akan mudah diintervensi.[[5]](#footnote-5)

Sudah banyak kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan telah diungkap, Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut TNI), hal ini bukanlah sekedar persangkaan hukum yang belum terjadi atau tidak akan mungkin terjadi, namun seiring berjalannya waktu permasalahan ini merupakan realita hukum yang merupakan isu hukum yang perlu dikaji dan ditemukan solusi terbaik menurut hukum sehingga diperlukan politik hukum untuk memperbarui perundang-undangan yang ada agar dapat menutup celah hukum dan menjawab permasalahan yang ada.

Pada tanggal 4 Juli 2013 Badan Narkotika Nasional (selanjutnya penulis sebut BNN) telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang pengedar narkotika yang merupakan oknum TNI AU dari Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Menurut Deputi Pemberantasan BNN, Serma Bambang Winarno (BW) yang ditangkap oleh BBN Pusat bersama seorang anggota TNI AU Sersan Dua (Serda) Ricky Yordani (RY),Oknum TNI yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kamis (4/7/2013). Dari Bambang, BNN menyita 300 butir ekstasi berwarna pink, dompet berisi uang, 2 ponsel, kartu identitas TNI AU, serta mobil Suzuki. Bambang yang berpangkat Sersan Mayor TNI juga diduga pemasok utama ekstas tersebut merupakan bandar Narkoba jenis ekstasi tersebut diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil bisnis narkobanya selama ini. Indikasinya, Serma BW memiliki harta bernilai miliaran rupiah yang diduga diperoleh dari hasil pencucian uang. Tetapi disaat BNN akan mengusutnya terjadi perbedaan paham siapa yang berwenang mengusut tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana utamanya narkotika mengingat pelakunya seorang anggota TNI.

Hal ini merupakan sebuah dilema sekaligus fenomena dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, karena UU TPPU menyebutkan secara limitatif lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sementara menurut ketentuan dalam Undang – Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya penulis sebut Undang-Undang Peradilan Militer) mensyaratkan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik itu tindak pidana umum atau pun tindak pidana militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik dari institusi TNI.[[6]](#footnote-6)

Sebenarnya gagasan untuk memberikan batasan terhadap kompetensi Peradilan Militer sudah dituangkan dalam agendapolitik hukum nasional yakni yang tersebut dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut UU TNI) menyebutkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sehingga akan jelas kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, namun hal tersebut baru akan diberlakukan setelah Undang-Undang Peradilan Militer diubah, ini artinya selama Undang-Undang Peradilan Militer belumdiubah tetap akan terjadi dilema terkait prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, khususnya tindak pidana pencucian uang.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sangat layak untuk dikaji secara akademis dalam bentuk tesis dengan judul **“Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia“.**

## Rumusan Masalah

Dengan mendasar atau memperhatikan uraian latar belakang tesis ini maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana mekanisme peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan TPPU?
3. Bagaimana kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggotaTNI?

## Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini adalah sebagai berikut :

* + - 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang.
      2. Untuk mengetahuai mekanisme peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan TPPU
      3. Untuk mengetahui kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggotaTNI

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan berupa argumen yuridis maupun legalitas berkaitan tentang kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militerterhadaptindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI. Hasil karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana di masa yang akan datang.

## Keaslian Penelitian

Judul proposal tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau originalitasnya, meskipun ada tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan tesis ini diantaranya adalah :

1. Budi Pramono, Kewenangan Melakukan Penyidikan Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Prespektif Hukum, No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2013.(Selanjutnya penulis sebut artikel I),Pada artikel I, permasalahan dilihat dari perspektif siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggotaTNI yang melakukantindak pidana pencucian uangdan apakah penyidik Polisi Militer berwenang melakukan penyidikanterhadap anggotaTNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang(dalam perspektif lembaga dan pelaku), hasil peneltiian menunjukkan bahwa Untuk proses hukum terhadap anggota TNl aktif yang melakukan tindak pidana berada dalam penyidikan militer sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dan Undang-UndangNo.48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman jo. Undang-UndangNo.3 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pada kasus prajurit TN'I aktif melakukan tindak pidana pencucian uang hingga saat ini aturan liukuirnya belum ada sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum maka dapat digunakan ketentuan dalam UU peradilan militer.
2. Muhammad Fadli, Peran Politik Pembaharuan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Personil Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jurnal Legislasi Indonesia, No. 2 Vol. 11, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.(Selanjutnya penulis sebut artikel II),pada artikel II permasalahan dilihat dari perspektif bagaimanakah penyidikan laporan hasil analisis atau pemeriksaan PPATK terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh anggotaTNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personil TNI tunduk pada peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) sehingga proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dilaksanakan dalam hukum acara peradilan militer. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengatur bahwa personil tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, akan tetapi belum ada revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer. Untukitudiperlukanperanpolitikhukumdalampembaharuan UU TPPU dan UU Peradilan Militer agar dapat terpenuhinya kepastian hukum dan persamaan kedudukan di muka hukum serta selaras dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia sebagaimana pembukaan UUD NRI 1945

Dalam tesis ini penulis membahas permasalahan dari perspektif yang berbeda dari kedua artikel tersebut diatas, yakni terkait kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dimana dilihat dari perspektif perbuatannya bukan dari lembaganya atau pelakunya sebagaimana dikaji dalam artikel I, serta kebijakan formulasi kewenangan penyidikan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam konteks *ius constituendum* yang bersifat preskriptif terhadap isu hukum yang diangkat, sedangkan pada artikel II membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pencucian uang yang dilakukan oleh anggotaTNI yang mana perbedaannya terletak pada konteks waktu, dalam artikel II pada konteks pelaksanaan, sedangkan dalam tesis ini dalam konteks *ius constituendum* yang bersifat preskriptif, oleh karena itu menjadikan tesis ini berbeda dengan kedua artikel sebagaimana tersebut di atas.

## Kerangka Teori dan Konsepsi

**1. Pertanggungjawaban Pidana**

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu dari kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.[[8]](#footnote-8)

Apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya, tetap pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri bilamana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan melanggar undang-undang dan hal tersebut tidak dapat dipidana.[[9]](#footnote-9)

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukumanyang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.[[10]](#footnote-10)

Pembentukan undang-undang kitatelah mengunakan perkataan *straftbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *straftbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” *atau een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straftbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *straftbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atupun tindakan.

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *straftbaar feit,* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *straftbaar feit* tersebut.[[11]](#footnote-11)

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan pidana. Keadaan yang menhapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.[[12]](#footnote-12)

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintangdan Frannciscus Theojunior Lamintang, meereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *straftbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tetentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[[13]](#footnote-13)

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Frannciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *straftbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak oaring lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.[[14]](#footnote-14)

Menurut Profesor Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Frannciscus Theojunior Lamintang, perkataan *straftbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tiding dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”[[15]](#footnote-15)

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *straftbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.[[16]](#footnote-16)

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertangggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.[[17]](#footnote-17)

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh *menyadari* tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hokum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakn tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Hal petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. POMPE selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak”maka sifatmelawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pemidanaan atau peindak tidak dipertanggungjawabkan pidana.[[18]](#footnote-18)

Dapat ditegaskan bahwa “tiada pemidanaan tanpa unsure bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). “*adagium*” ini dapat disejajarkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementarra guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.[[19]](#footnote-19)

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditemtukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata *“undang-undang”* penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif*baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.[[20]](#footnote-20)

**2. Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.[[21]](#footnote-21) Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama. [[22]](#footnote-22)

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”. [[23]](#footnote-23) Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). [[24]](#footnote-24)

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. [[25]](#footnote-25)

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. [[26]](#footnote-26)
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.[[27]](#footnote-27)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. [[28]](#footnote-28)

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “s*ocial welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.48

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan. [[29]](#footnote-29)

Selanjutnya dinyatakan olehnya[[30]](#footnote-30)"Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”.

**2.1.Kompetensi**

Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam Jurnal Manajemen Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kompetensi sebagai kemampuan dari seorang individual yang ditunjukkan dengan kinerja baik dalam jabatan atau pekerjaannya. Adapun pengertian Kompetensi Kerja menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 10 yang berbunyi, “Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan”.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan. Untuk membangun kecakapan kompetensi seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, dan seorang karyawan sebaiknya harus memperhatikan apa saja yang menjadi faktor pendukung terwujudnya kecakapan tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu :

1. Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

1. Keterampilan

Keterampilan seseorang dapat dilihat dari diri kita sendiri apakah kita mempunyai keterampilan atau tidak dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahan.

1. Karakteristik Kepribadian

Dalam Karakteristik Kepribadian termasuk mempunyai banyak faktor yang diantaranya sangat sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah.

1. Kompetensi

Kompetensi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah-ubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan karyawan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap kompetensi seseorang bawahan.

1. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi.

1. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis.

1. Disiplin kerja

Disiplin kerja mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam beberapa kegiatan.

**2.2. Penyelidikan**

Pada mulanya, sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan pada tahun 1961 (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Undangundang Nomor 15 Tahun 1961), umum dipakai istilah ”pengusutan” sebagai pedoman istilah Belanda opsporing dan istilah Inggris investigation. Tetapi dengan diperkenalkannya istilah baru oleh kedua undang-undang tersebut, yaitu ”penyidikan” dengan arti yang sama dengan yang tersebut diatas, maka sejak itu hilanglah secara perlahan-lahan istilah ”pengusutan” tersebut yang biasanya dipakai oleh para penerjemah HIR menjadi RIB untuk mengartikan istilah Belanda dalam HIR, yaitu opsporing tersebut.

Hamrat Hamid dan Harun Husein berpendapat bahwa secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada penuntut umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, ppns, tumpang tindih dalam inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena kedua instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kemungkinannya adalah bahwa sering kali terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang–undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan antara peraturan perundang–undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidak serasian antara hukum tercatat denga hukum kebiasaan dan seterusnya atau lebih, dan pada akhirnya kembali lagi pada pemilik uang tunai tersebut yaitu orang kedua. Pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari. Penekanan yang agak keliru di anggap dalam memberikan penerangan/penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap.

**2.3. Tindak Pidana**

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.[[31]](#footnote-31)

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang (melawanhukum) yang patut dipidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengannegara. Dengan kata lain hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dengan negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatanyang memenuhi syarat-syarat tertentu yang pastinya telah atau sudah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah di aturdan berlaku bagi setiap warga Negara tersebut.[[32]](#footnote-32)

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim[[33]](#footnote-33)

**2.4. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sebelum membahas lebih jauh tentang ruang lingkup tindak pidana umum, timbul suatu pertanyaan “Apakah tindak pidana itu?” Adami Chazawi, menyebutkan istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit.[[34]](#footnote-34)Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar feititu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah – istilah yang pernah digunakan, baik dalam berbagai perundang – undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*adalah sebagai berikut:

1. *Tindak Pidana*;
2. *Peristiwa Pidana;*
3. *Delik*;
4. *Pelanggaran Pidana*;
5. *Perbuatan yang boleh dihukum;*
6. *Perbuatan yang dapatdihukum*;

7. *Perbuatan Pidana*.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar*dan *feit.*Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar*diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit*diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata *“Straf”*artinya pidana, *“baar”*artinya dapat atau boleh dan *“feit”* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit*secara utuh, ternyata *straf*diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf*sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata *“baar”*, ada dua istilah yang digunakan yakni, boleh dan dapat. Secara *literlijk*bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit*digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk, feit*memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing – masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, menurut beliau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit*itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu *“tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”*.

Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit*adalah suatu *kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*.

R. Tresna menyatakan *Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.*

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah *“perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh yang dapat dipertanggungjawabkan”.*

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah *suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.*H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah *“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.[[35]](#footnote-35)*

Simons, merumuskan *Strafbaar feit*adalah *“suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.[[36]](#footnote-36)*

Menurut Barda Nawawi Arief, dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.Selanjutnya menurutAdami Chazawi pembagian tindak pidana ke dalam kelompok tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif, yang pertama adalah atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana dan yang kedua adalah atas dasar sumbernya.[[37]](#footnote-37)

1. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana

1. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subyek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
2. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subyek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.

2. Atas dasar sumbernya

Pembedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus berdasarkan perspektif ini berbeda dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Hukum pidana umum di sini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Kodifikasi (asal kata *codex*, Latin) adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.

Menurut *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),* mendefinisikan pencucian uang *(money laundering)* sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Menurut Clifford L. Karcmer, berpendapat bahwa *money laundering*adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.[[38]](#footnote-38)

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan *(crime organization)* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah – olah sebagai uang yang sah.

Sementara, Undang-UndangNo. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNo. 8 Tahun 2010 memberikan pengertian terhadap Pencucian Uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakpidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Sedangkan dalam Undang-UndangNo. 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU, sebagai penyempurnaan Undang-UndangNo. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNo. 8 Tahun 2010), dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-UndangNo.8 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara jelas pengertian pencucian uang sebagaimana undang-undang sebelumnya yakni Undang-UndangNo.25 tahun2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNo.25 tahun 2003, oleh karena itu menurut Undang-UndangNo. 8 Tahun 2010, yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut.

Pasal 3 menyatakan :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 menyatakan :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau ,menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).

Dari definisi tersebut di atas, tampak ciri dari kejahatan ini, yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime*atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama *(core crime)*. Penentuan *core crime*dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *predicate offence*atau *unlawful activity*atau *predicate offense*, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan ini merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.Kejahatan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara (modus operandi), Menurut

Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, seperti di kutip oleh Siahaan (Siahaan, 2002) ada 13 modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu:

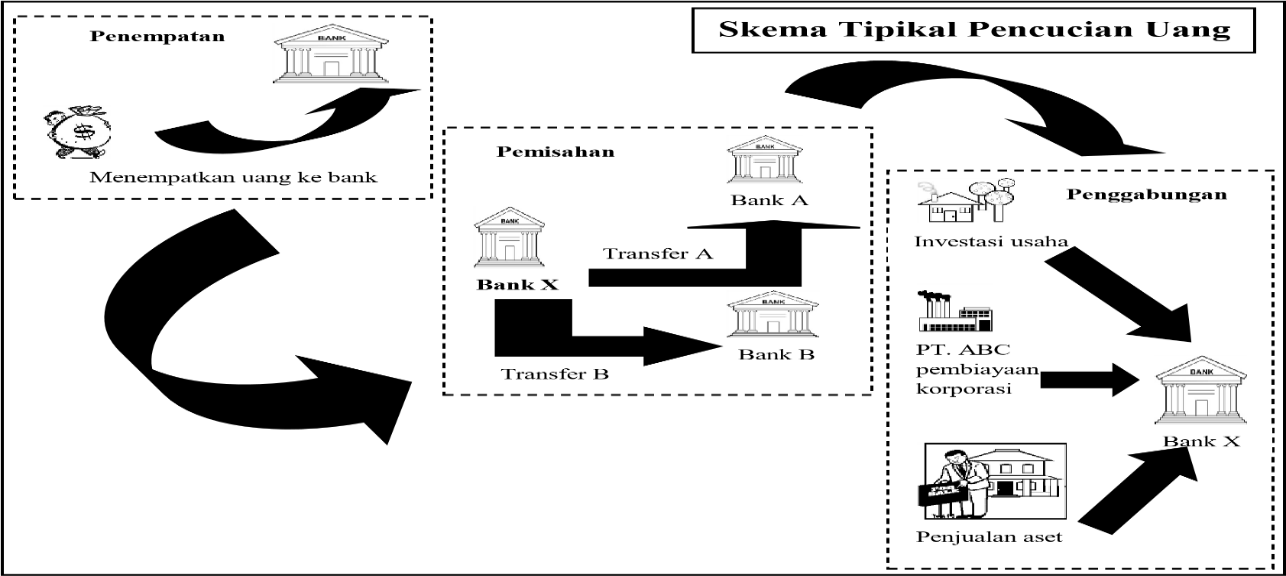
* 1. Modus secara *Loan Back*, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang saham adalah ia sendiri.
  2. Modus Operandi *C-Chase*, modus ini cukup rumit dan sifatnya berliku-liku, beberapa kali ke beberapa bank lain, lalu dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit*untuk menjamin *loan.* Disini *loan* tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposit saja.
  3. Modus Transaksi Dagang Internasional dengan menggunakan sarana dokumen L/C yang menjadi fokus urusan bank, baik koresponden maupun *opening bank* adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenahi keadaan barang. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran *Money Laundering*, adalah *invoice* yang besar terhadap barangyang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

1. Modus Penyelundupan Uang Tunai, membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau Bandar udara.
2. Modus Pembelian Perusahaan (Akuisisi) kemudian sahamnya dijual lagi kepada pihak lain dan menghasilkan uang, uang tersebut adalah uang yang kelihatan bersih.
3. Modus *Over Invoice*atau *Double Invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sndiri, lalu diluar negeri (yang bersifat *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan dinegara *tax heaven*ini mengekspor keIndonesiadan perusahaan ini membuat *invoice*pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *double invoice*. Supaya perusahaan diIndonesiaterus bertahan maka perusaan di luar negeri memberikan *loan* (pinjaman). Dengan cara ini, uang kotor dari perusahaan di negara lain itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri.
4. Modus *Real Estate*, yaitu menjual suatu *property*beberapa kali kepada perusahaan kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Modus yang sama pula dilakukan dalam pasar modal, yakni pembelian saham itu hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran harga tinggi.
5. Modus Investasi tertentu, biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau barang antik, kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal.
6. Modus Perdagangan Saham. Modus Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku kejahatan pencucian uang.
7. Modus *Pizza Connection*, modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
8. Modus *La Mina*. Modus ini terjadi di Amerika Serikat tahun 1990, dana yang diperoleh dari perdagangan obat sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan di ekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat illegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan di kirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Columbia guna didistribusi membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.
9. Modus *Deposit Taking*. Mendirikan Perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti *Chartered Banks*, *Trust Companied and Credit Union*. Kasus *Money Laundering*yang melibatkan DTI antara lain: Transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah, dan *Treasury bills.*
10. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai pemutih uang dengan cara mendepositkan secara nama palsu, menggunakan *save deposit box*untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund transfer*untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.[[39]](#footnote-39)

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan *(placement),* pemisahan/pelapisan *(layering),*dan penggabungan *(integration).*

* 1. Penempatan *(placement)* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
  2. Pemisahan/pelapisan *(layering)* adalah memisahkan hasil tindak pidanadari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
  3. Penggabungan *(integration)* adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Modus operasi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement, layering,* maupun *integration,* sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan, secara skematis tipologi pencucian uang dapat diilustrasikan dalam skema berikut.[[40]](#footnote-40)



**2.5. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara Nasional Indonsia yang d isebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban prajuri berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu berpedoman pada Hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajiannya dapat berjalan dengan sempurna.

Fungsi dari TNI bahwa TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai di antaranya penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara sebagaimana pasal 6 UU TNI.

Dalam penerapan hukum pidana Indonesia tersebut di luar negeri, dalam hal-hal tertentu akan dihadapkan dengan sesuatu kesulitan, bilamana suatu ketentuan tindak pidana itu bersifat nasional atau kedaerahan. Bukankah undang-undang hukum pidana Indonesia tidak dimaksudkan supaya berlaku secara Internasional. Demikianlah misalnya jika seseorang anggota TNI dengan sengaja memasukkan sesuatu meterai, tanda atau merek yang palsu ke negeri asing, di negara mana ia sedang berada, sukar diterapkan ketentuan pasal 257 KUHP, karen pasal ini mensyaratkan secara tegas; memasukkan ke Indonesia.

Pasal 5, bahwa Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer. Secara umum ketentuan-ketentuan ini merupakan perluasan dari asas nasional pasif atau asas perlindungan ditinjau dari sudut kepentingan negara yang harus dilindungi. Dengan demikian ketentuan ini merupakan perluasan dari pasal 4 ke-1, ke-2 bagian akhir dan ke-3 KUHP. Iajugamerupakan“*extrapersonaliteitsbeginsel*”atau“*extra territorialiteitsbeginsel*”, apabila ditinjau dari sudut justisiabel dan dari sudut rialiteitsbeginsel”, apabila ditinjau dari sudut justisiabel dan dari sudut persidangan Mahkamah Militer yang sedang bertugas di luar negeri. Bukan saja terhadap delik-delik yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 4 KUHP, tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk *justisiabel* peradilan militer. Tolak pangkal ketentuan ini adalah melindungi kepentingan negara. Selain dari pada itu juga demi memungkinkan pelaksanaan tugas militer dengean baik dan melindungi kepentingan-kepentingan militer lainnya (*extra beschermingsbeginsel*).

**2. Kerangka Konsepsi**

1. **Pertanggungjawaban Pidana**

Kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.

1. **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

1. **Tentara Nasional Indonesia**

Sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

## Metode Penelitian

### Jenis dan Sifat Penelitian

**a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini juga bersifat empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[[41]](#footnote-41)

**b. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

### Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim16, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi :[[42]](#footnote-42)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang PemisahanTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
8. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
9. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
10. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
11. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukanmerupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam analisisnya menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berbentuk studi kepustakaan, yaknipengumpulan data dengan cara mempelajari buku hukum, artikel-artikel atau tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas dan dari internet yakni mengakses situs-situs yang ada dan berhubungandengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.[[43]](#footnote-43)

Kepustakaan yang digunakan harus mempunyai relevansi dengan penelitian, oleh karenanya bahan-bahan yang akan ditelaah harus terlebih dahulu diseleksi secara ketat dan cermat untuk melihat kepustakaan mana saja yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti atau dikaji.

### Analisis Data

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penetapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan:

* 1. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan
  2. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Menemukan makna *(begrip)*pada kata atau definisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik, dan sebagainya.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika hukum dengan metode deduksi, yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.

Teknik analisa dari hukum primer dilakukan dengan teknik kajian isi *(content analyze)*, Menurut Holsti kajian ini adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.[[44]](#footnote-44)

# BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## Pertanggungjawaban Pidana

Tindak Pidana Militer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TNI atau orang-orang yang karena kondisi tertentu statusnya dipersamakan dengan TNI, misalnya purnawirawan yang disebabkan memiliki keahlian khusus maka masih dipekerjakan kembali dalam lingkup TNI, pegawai administrasi dalam lingkup TNI dan setiap prajurit TNI yang masih dinas aktif dalam lingkup kesatuan TNI. Bagi orang-orang tersebut di atas apabila melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai untuk memproses pelaku berbeda dengan orang sipil. Jika orang sipil melakukan tindak pidana maka payung hukumnya adalah Hukum Pidana Umum adapun apabila pelakunya TNI maka payung hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur kejahatan terhadap perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Ruang lingkup tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KUHDP ABRI). Dalam KUHPM bab yang mengatur tentang tindak pidana militer tercantum dalam BAB II mengenai kejahatan seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan karena memberi bantuan kepada musuh, desersi, pencurian, penadahan dan perusakan terhadap barang-barang keperluan perang. Sedangkan pelanggaran terhadap KUHDP ABRI seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit

49

Selain kedua undang-undang tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka dapat diberlakukan KUHP dan undang-undang khusus lain di luar KUHP misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KDRT.

Kondisi tersebut di atas memungkinkan untuk diterapkan dikarenakan KUHPM sendiri menegaskan untuk dapat menerapkan aturan hukum lain yang belum diatur dalam KUHPM, dengan maksud sebagai jalan keluar agar apabila seorang TNI atau yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana, ia tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dapat dipahami jika TNI atau orang yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana maka undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum untuk memproses orang tersebut lebih bervariasi dari pada orang sipil. Pasal-pasal yang mengatur tentang keadaan tersebut adalah Pasal 103 KUHP, Pasal 1 KUHPM dan Pasal 2 KUHPM

Pengertian subyek disini adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subyek dalam tindak pidana militer berbeda dengan subyek dalam tindak pidana umum, namun perbedaan tersebut hanya dalam lingkup status pelaku sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 68 dan Pasal 69 KUHPM. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana militer atau apabila orang itu melakukan tindak pidana maka akan diadili dengan menggunakan KUHPM. Orang-orang yang dimaksud adalah setiap orang yang masuk dalam kesatuan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1998 yaitu Prajurit TNI (Angkatan Darat, Laut dan Udara), mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali atau mereka yang dipersamakan dengan militer (para mobilisan, militer Tituler atau Militer Asing).

Obyek tindak pidana militer setiap perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam KUHPM. Perbuatan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver millitaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*). Pengertian tindak pidana militer murni (*zuiver millitaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer.

Salah satu contoh kasus pada Tindak Pidana Militer yang dilakukan oleh Serma Bambang Winaro adalah tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah narkotika. Pada kasus tersebut pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dan dikeluarkan secara tidak hormat dari insitusi TNI sebagai anggota militer, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 yang menyatakan bahwa: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Fakta Hukum

Hukum Pidana Militer pada dasarnya hukum yang berlaku dan dikenakan kepada anggota militer. Hukum pidana militer merupakan ketentuan umum yang mengatur seorang militer yang memuat tindakan-tindakan yang dinilai masuk kategori Pelanggaran atau Kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan, serta sanksi pidana sebagai ancaman bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut Amiroeddin Sjarif hanya sedikit orang yang menaruh perhatian pada hokum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem hukum dari Negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa.

Menurut Moch Faisal Salam hokum pidana materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.[[45]](#footnote-45) Sedangkan hokum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukumyang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hokum pidana materil. Hukum pidana formil disebut juga hokum acara pidana yang bertugas mempertahankan hokum pidana materil.

Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama halnya dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga Negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan warga Negara biasa dalam hakekatnya setiap warga Negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan Negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas pokok Angkatan Bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh,baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.[[46]](#footnote-46)

Hukum khusus lebih tegas dan berat bagi anggota tentara dikarenakan:

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum. Misalnya, Desersi, menolak perintah dinas,insubordinasi dan sebagainya
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara didalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hokum pidana umum dianggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut diatas dimasukkan kedalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak untuk melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan.[[47]](#footnote-47)

Menurut Amiroedin Syarif dalam bukunya hokum militer merupakan hukum yang khusus, hal tersebut terletak pada sifat hukumnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hokum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer.Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam:

1. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hokum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan disersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
2. Kejahatan perang (*war crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional[[48]](#footnote-48)

Seorang militer dapat pula melakukan pelanggaran hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentigan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri. Salah satu contohnya tidak memberikan hormat kepada atasan, yang pada hakikatnya tidak menyangkut soal kepentingan umum melainkan semata-mata menyangkut kepentingan militer atau tata tertib militer.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan seperti yang telah dijabarkan diatas maka setiap prajurit militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tahu benar akan kewajiban-kewajiban hukumannya yang pokok atau esensial. Bagi para militer walaupun tugasnya untuk bertempur dan membunuh musuh, tetapi didalam tindakannya itu diatur oleh hukum perang yang dikenal dengan hukum humaniter.

Adapun tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militerire delic*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militerire delict*). Berikut adalah penjelasannya:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militerire Delict*) Adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah kedalam kekuasaan musuh,suatu tempat atau pos yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu. Kejahatan desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM yaitu: yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat (4) hari, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 Ke-2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan bulan. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*) Adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain jenisnya sama, diatur kembali didalam kitab undang-undang hukum pidana militer disertai dengan kekhasan militer. Contoh: Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM, Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.[[49]](#footnote-49)

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu Samsul Bahri menyatakana bahwa tersangka BW benar ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 4 Juli 2013, tersangka merupakan salah satu anggota TNI AU dari Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Serka Samsul Bahri menemukan 300 butir ekstasi berwarna pink, dompet berisi uang, 2 ponsel, kartu identitas TNI AU, serta mobil Suzuki dan berdasarkan hasil penyidikan tersbut diungkapkan bahwa benar tersangka melakukan tindak pidana narkotika dengan jenis ekstasi, uang hasil perbuatannya tersebut berjumlah milyaran rupiah dan digunakan untuk keperluan pribadinya seperti membeli rumah, tanah, mobil, apartemen dan sebahagian ditabung.

Aturan terkait pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) tentang Peradilan Militer yang mengatur “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hokum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamaanan negara”
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan MiliterPasal 47 ayat (1) yang mengatur “Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara dibidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 ayat (1) yang mengatur “penyidik adalah:Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur”
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (2) yang mengatur “penyidikan perkara pidana.

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hokum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anggota TNI diadili di Peradilan Militer dan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Akan tetapi, dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil, anggota TNI tersebut dapat diadili di Peradilan Umum atau Peradilan Militer dan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik gabungan dari Polri atau PPNS dan Polisi Militer atau Oditur berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Merujuk pada pemahaman tersebut,apabila dikaitkan dengan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-UndangTPPU Pasal 74 dan Penjelasan serta kewenangan untuk menyidik anggota TNI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggotaTNI yang diduga melakukant indak pidana pencucian uang, terhadapnya tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana karena yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer, sedangkan ketiganya tidak termasuk kedalam penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Undang-Undang TPPU Pasal 74.
2. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sipil, sekalipun dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri atau PPNS dengan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetap akan menimbulkan

Permasalahan terkait kewenangan penyidikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas dan tidak adanya kewenangan Penyidik Polri atau PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI. Bahwa situasi diatas telah menimbulkan ketidak pastian dalam proses penegakan hokum berupa tidak adanya kejelasan atas tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian, situasi ini juga telah secara langsung menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang adalah masyarakat sipil, maka setidak-tidaknya ada kemungkinan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebaliknya, dalam hal pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucianuang adalah anggota TNI, secara normatif, dugaan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut semata-mata karena tidak ada pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan

Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sifat Terdakwa yang sangat rendah pemahamannya terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena Terdakwa terlilit banyak hutang serta Terdakwa mengharapkan keuntungan yang besar dengan cara yang mudah dan cepat dari transaksi Narkotika, sehingga Terdakwa berani melakukan kegiatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Ekstasi yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang benvenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta tanggung jawabnya sebagai anggota TNI yang seharusnya mencegah hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika, namun Terdakwa justru ikut dalam peredaran Narkotika golongan I jenis Ekstasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis biasanya sanksi pidana terhadap TNI yang mengedarkan narkotika berupa pidana penjara selama 1 tahun dan diberhentikan dari dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi berupa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata sesuai dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo Buku I KUHP pasal 35 ayat 2. Setelah TNI yang bersangkutan telah dinyatakan dipecat dari dinas kemiliteran maka kesatuan akan menyampaikan pada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan administrasi yang berisi pemecatan TNI tersebut dari dinas kemiliteran, sedangkan pertanggungjawaban pidana pencucian uang yang dilakukan oknum TNI dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dan diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

# BAB III PENYIDIKAN TINDAKPIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

## Tahap Pelaporan

Laporan Hasil Analisis terkait transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disebabkan karena dalam UU PPTPPU belum mengatur penyidik TNI sebagai penyidik tindak pidana asal. Sedangkan TNI memiliki penyidik khusus yaitu, Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer dan Oditur Militer sebagaimana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

1. Atasan Yang Berhak Menghukum
2. Polisi Militer
3. Oditur Militer

Sedangkan dalam Ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu:

1. Provos TNIAngkatan Darat
2. Provos TNI Angkatan Laut
3. Provos TNI Angkatan Udara

Hukum Acara Pidana Militer merupakan Hukum Acara Pidana Khusus. Ketentuan mengenai kewenangan penyelidikan dalam hukum acara pidana umum dilakukan oleh Polisi Negara di dalam Hukum Acara Pidana Militer kewenangan

tersebut dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui Bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer.[[50]](#footnote-50)

Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan bahwa:[[51]](#footnote-51)

“Laporan Hasil Analisis (LHA) terhadap rekening perwira TNI tidak dapat diperlakukan sama dengan temuan serupa di kepolisian. Adapun hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan pada rekening milik anggota TNI jalan di tempat”.

Lebih lanjut M. Yusuf juga menjelaskan bahwa:“tak ada satupun penegak hukum yang dapat menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus itu, Hal ini menjadi hambatan karena ada celah hukum, dimana belum ada regulasi yang mengatur instansi mana yang akana menerima penyampaian hasil analisi transaksi dari PPATK yang melibatkan anggota TNI”.

Ketentuan dalam PenjelasanUndang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 74 Adapun penyidikan tindak pidana Pencucian Uang di dalam Pasal 74 yaitu Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain menurut UU PPTPPU. Adapun penjelasan Pasal ini dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”

Berkaitan dengan hal tersebut PPATK telah mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 37 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Haryono Budhi Pamungkas, Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat PPATK, menjelaskan bahwa:[[52]](#footnote-52)

“PPATK sudah melakukan upaya duduk bersama dengan TNI akan tetapi tidak ditemukan solusi, sehingga PPATK mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan jawaban, apakah TNI memiliki kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah PPATK bisa menyampaikan Laporan Hasil Analisis kepada TNI.”

PPATK menanyakan kewenangan penyidikan TNI terkait Tindak Pidana Pencucian Uang karena belum diaturnya penyidik TNI sebagai penyidik tindak pidana asal dalam UU PPTPPU. Sedangkan PPATK menanyakan kewenangan PPATK menyampaikan Laporan Hasil Analisis kepada TNI. Hal ini dikarenakan karena PPATK hanya dapat meneruskan Laporan Hasil Analisis kepada penyidik sebagaimana diatur dala UU PPTPPU yaitu, penyidik tindak pidana asal.

Menurut penulis terkait upaya tersebut. Berdasarkan cara memperoleh kewenangan menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Sehingga upaya PPATK dalam mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung terkait tindak lanjut Laporan Hasil Analisis terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak memiliki konsekuensi hukum yang kuat.

Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan kelamahan substansi dari sistem hukum. Menurut Friedman, *“substanstance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.* Jadi yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu.[[53]](#footnote-53)

Menurut penulis, kebijakan anti pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari politik hukum pemerintah. Hal ini berkaitan dengangaris kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Muhammad Djafar Saidi, “Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern *(welfare state modern).[[54]](#footnote-54).* Sebagai negara yang bercirikan negara kesejahteraan yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat.[[55]](#footnote-55) Maka dari itu diperlukan arah kebijakan resmi pemerintah dalam pengaturan masalah yang dihadapi terkait tindak pidana pencucian uang khususnya mengenai tindak lanjut Laporan Hasil Analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik yang telah menjadi persoalan sejak pembahasan Rancangan undangUndang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seperti diperlukan adanya regulasi atau kebijakan mengenai Laporan Hasil Analisis yang layak untuk ditindaklanjuti di tingkat penyidikan. Mengingat tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[56]](#footnote-56)

## Tahap Penyidikan

Aturan terkait pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) tentang Peradilan Militer yang mengatur “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hokum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamaanan negara”
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 47 ayat (1) yang mengatur “Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara dibidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 ayat (1) yang mengatur “penyidik adalah:Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur”
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (2) yang mengatur “penyidikan perkara pidana.

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hokum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anggota TNI diadili di Peradilan Militer dan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Akan tetapi, dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil, anggota TNI tersebut dapat diadili di Peradilan Umum atau Peradilan Militer dan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik gabungan dari Polri atau PPNS dan Polisi Militer atau Oditur berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Merujuk pada pemahaman tersebut,apabila dikaitkan dengan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-UndangTPPU Pasal 74 dan Penjelasan serta kewenangan untuk menyidik anggota TNI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggotaTNI yang diduga melakukant indak pidana pencucian uang, terhadapnya tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana karena yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer, sedangkan ketiganya tidak termasuk kedalam penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Undang-Undang TPPU Pasal 74.
2. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sipil, sekalipun dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri atau PPNS dengan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetap akan menimbulkan

Permasalahan terkait kewenangan penyidikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas dan tidak adanya kewenangan Penyidik Polri atau PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI. Bahwa situasi diatas telah menimbulkan ketidak pastian dalam proses penegakan hokum berupa tidak adanya kejelasan atas tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian, situasi ini juga telah secara langsung menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang adalah masyarakat sipil, maka setidak-tidaknya ada kemungkinan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebaliknya, dalam hal pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucianuang adalah anggota TNI, secara normatif, dugaan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut semata-mata karena tidak ada pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan

Selanjutnya dalam Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 1 angka 25menyebutkan Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan mengenai yustisiabel peradilan militer tampak pada Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 9ayat (1) yang menyebutkan kewenangannya mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan adalah:

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atauyangdipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang;
4. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalamlingkungan peradilan militer.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak dengan jelas bahwa Penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikanterhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer apapun bentuk tindak pidananya, baik itu tindak pidana umum ataupun tindak pidana militer, dan di dalam lingkungan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer tersebut ditentukan secara khusus perangkat hukum yang berwenang melakukan penyidikan yakni Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur.

## Tahap Penuntutan

Pelimpahan perkara kepada oditur :

Setelah penyidik dalam hal ini polisi militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah:

1. Meneliti persyaratan materiil / formil.
2. Bila hasilnya belum lengkap meminta kepada penyidik agar melengkapi.
3. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk.
4. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas.
5. Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, di disiplinkan atau ditutup.

Tahap pemeriksaan di persidangan

1. Berkas perkara yang diterima pengadilan militer dari oditur militer di catat oleh kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut.
2. Kepala pengadilan kemudian menyerahkan berkas perkara kepaa katera melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan kepala pengadilan militer menelitiapa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil.
3. Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena terdakwa berubah pangkat dari perwira pertama ke perwira menengah maka berkas harus segera di kembalikan ke oditur militer dengan penetapan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang lebih berwenang.
4. Dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain diluar daerah hukum suatu pengadilan maka berkas perkara segera dikembalikan ke oditur militer dengan penetapatn dari kepala pengadilan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas terdakwa (sesuai pasal 10b undang-undang nomor 31 tahun 1997).
5. Dalam hal kepala pengadilan berpendapat bahwa perkaea tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya maka ia segera menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan panitera membuar rencana sidang untuk di serahkan kepada oditur militer dengan perintah supaya oditur memanggil terdakwa dan para saksi untuk hadir dipersidangan.
6. Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di peradilan umum yang dapat di lihat pada Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 dan pasal 22. Dimana pasal 22 berbunyi “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”.
7. Penasihat hukum
8. Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk mendampinginya dalam persidangan.
9. Pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat keputusan panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan.
10. dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
11. pidana mati;
12. pidana penjara lima belas tahun atau lebih;
13. pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan terdakwa tidak mampu mengusahakan penasihat hukum sendiri;

Maka hakim ketua wajib mengusahakan penasihat hukum bagi terdakwa malalui papera yang bersangkutan atas biaya negara untuk mendampingi terdakwa di sidang, kecuali apabila terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat hukum.

Dengan di undangkannya Undang–undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka tugas Oditur Militer pada dasarnya sama dengan tugas–tugas yang dilakukan oleh jaksa pada Pengadilan Negeri. Akan tetapi walaupun banyak persamaannya, terdapat perbedaan yaitu berdasarkan ketentuan KUHAP wewenang Jaksa untuk mengadakan pemeriksaan permulaan/penyidikan pindah seluruhnya ke tangan Kepolisian Negara, sedangkan menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana Militer hal itu dimungkinkan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah :

1. Atasan Yang Berhak Menghukum.
2. Polisi Militer.
3. Oditur Militer.

Berdasarkan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, “Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal–hal yang harus dilengkapi”.

Akan tetapi tidak demikian halnya di bidang penahanan, maka Oditur tidak mempunyai wewenang sebagaimana jaksa pada Pengadilan Negeri, hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu : “Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”.

Suatu kekhususan dari hukum Acara Pidana Militer adalah bahwa kepada para Komandan (Ankum/Papera) diberikan kewenangan tertentu dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana sejak dari tahap penyidikan, penangkapan/penahanan, penyerahan/penuntutan perkara, bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi logis dari ditegakkannya dasar-dasar organisasi militer.[[57]](#footnote-57)

Dalam hukum acara pidana militer, Oditur atau Polisi Militer hanya dapat mengusulkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum agar Tersangka ditahan. Oditur pada Pengadilan Militer tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan secara langsung suatu perkara pidana ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan Atasan Yang Berhak Menghukum, walaupun pada dasarnya penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer melalui Oditurat Militer. Oditurat Militer hanya mengusulkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum bahwa suatu perkara pidana harus diserahkan ke Pengadilan Militer atau ditutup demi hukum atau dikesampingkan, dengan mempersiapkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, kalau perkara itu harus diserahkan ke Pengadilan Militer, mempersiapkan Surat Penutupan Perkara kalau perkara itu akan ditutup demi hukum, dan mempersiapkan Surat Penyampingan Perkara, kalau Perkara itu harus dikesampingkan.

Setelah surat–surat tersebut di atas disetujui oleh Atasan Yang Berhak Menghukum, Oditur segera melaksanakan. Kalau suatu perkara pidana disetujui untuk diserahkan ke Pengadilan Militer, maka seterima Surat Keputusan Penyerahan Perkara, maka Oditurat Militer segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer yang berwenang.

Pengadilan Militer setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Atasan Yang Berhak Menghukum melalui Oditurat Militer, maka kepala Pengadilan Militer mempelajarinya seperlunya, kemudian menetapkan Hari Sidang (TAPSID), kemudian TAPSID tersebut dikirimkan kepada Oditurat Militer yang berwenang. Kemudian Kepala Oditurat Militer menunjuk Ormil yang akan menangani perkara tersebut berikut berkas perkaranya.

Ormil yang diserahkan tugas untuk menangani perkara yang bersangkutan guna keperluan penyidangan mempersiapkan dan melakukan kegiatan – kegiatan :

1. Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan Penetapan Hari Sidang dan Pembacaan Surat Dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi–saksi.
2. Selain Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, dibacakan pula Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) Surat Penetapan Hari Sidang (TAPSID), setelah dibacakan kepada Terdakwa dibuat berita acaranya, kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
3. Mempersiapkan barang bukti/surat-surat bukti guna diperlihatkan dalam sidang.

Oditur Militer yang menangani suatu perkara pidana, duduk dipersidangan selaku penuntut umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu : “Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan suatu perkara pidana”.

# BAB IV KOMPETENSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

## Kompetensi Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilang Militer

Di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.[[58]](#footnote-58)

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum[[59]](#footnote-59)

77

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyelidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus” [[60]](#footnote-60), disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. [[61]](#footnote-61)

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

“Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara.

Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. [[62]](#footnote-62)

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.

Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memilki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

## Kompetensi Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, pasal 74 dan 75 UU PPTPPU

Penjelasan Pasal 74 ini adalah :

*Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenan- gan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Sedangkan Pasal 75 adalah:

*Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.*

Pendapat dan argumen ini disandarkan pada penjelasan umum UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan: Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi negara, dan menggunakan modus yang semakin variatif**,** memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.

Pasal 69 UU PPTPPU :

*“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.*

Pendapat lain yang tidak kalah kuatnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa penyidikan TPPU mutlak baru dapat dilakukan setelah penyidikan tindak pidana asalnya berjalan. Pendapat ini besar kemungkinan didasari oleh penafsiran gramatikal Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU. Dalam penjelasan pasal tersebut, terdapat dua anak kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung “apabila”. Ini mengindikasikan bahwa anak kalimat pertama (*Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang*) baru dapat dilakukan setelah anak kalimat kedua (*menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya*) dilakukan. Artinya, anak kalimat pertama tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari anak kalimat kedua. Selanjutnya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak boleh (mutlak) dilaksanakan apabila penyidikan tindak pidana asalnya belum dilakukan. Lalu apa yang dapat dijadikan patokan bahwa penyidikan TPPU sudah dapat mulai dilakukan? Jawabnya adalah ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup. Mengingat tahap ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup adalah tahapan yang sangat abstrak dan subyektif maka tahap itu dapat ditarik ketika Surat Perintah Penyidikan (tindak pidana asal) dibuat.

Artinya, penyidikan TPPU tidak boleh mendahului tanggal Surat Perintah Penyidikan tindak pidana asal. Penentuan tapal batas ketika Sprindik/SP Sidik TP asal dibuat, dapat dibenarkan oleh KUHAP yang mendefinisikan suatu penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang TP yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan keluarnya Sprindik/SP Sidik perkara TPPU setelah tanggal Sprindik/SP Sidik tindak pidana asal maka semua pihak dapat berbaik sangka bahwa dalam rentang waktu tersebut, penyidik telah bekerja keras dan ternyata menemukan ada bukti permulaan yang cukup kasus TPPU.

Pasal 75 menekankan adanya bukti permulaan yang cukup perkara TPPU dan TP asal. Dimanakah dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup itu? tentu saja pada proses penyidikan. Proses penyidikan tentu saja harus diawali oleh lahirnya Sprindik/ SP Sidik.

## Kompetensi Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam ketentuan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 71 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.Sementara Pasal 72 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.Kalau ditelaah maksud dari Pasal 71 jo. Pasal 72 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009, tentu saja bisa dimengerti kalau yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaandan peredarangelap narkotikadan precursor narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawabkepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepada BNN yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredarangelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredarangelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidikpolri dan penyidik BNN.

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

1. penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 28 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor Tahun2009 tentang Narkotika;
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal87 sampai denganPasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Setelah diawali pembentukan regulasi anti *money laundering* dengan keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan penyempurnaan diantaranya mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya dan terakhir dilakukan penyempurnaan lagi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (selanjutnya penulis sebut UU TPPU).

Namun dalam perkembangannya, penerapan UU TPPU juga masih menyisakan permasalahan, salah satunya adalah dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, kemudian di dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang- undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sebenarnya apa yang disebutkan dalam Pasal 74 tersebut secara limitatif sudah sangat jelas tidak menyebutkan lembaga penyidik lain di luar apa yang telah disebutkan, dan juga sudah sangat jelas bahwa peruntukan UU TPPU adalah bagi setiap warga negara, sedangkan prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara *(citizens in uniform)*. Kemudian ketentuan Pasal 74 tersebut dipertegas lagi dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 68 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tentunya dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut sudah tidak perlu lagi adanya penafsiran.

Namun permasalahannya adalah sampai saat ini TNI masih tunduk pada UU Peradilan Militer, dalam Pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer disebutkan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan Penyidik adalah

1. Atasan yang Berhak Menghukum;
2. Polisi Militer; dan
3. Oditur.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 16 UU Peradilan Militer disebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sementara, yang dimaksud dengan tersangka disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 UU Peradilan Militer yakni Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, mengenai yustisiabel peradilan militer dijelaskan Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer, yang menyatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
4. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Atas ketentuan tersebut membuka celah hukum pada UU TPPU yang mana membuka penafsiran untuk dapatnya terjadi perkecualian dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah anggota TNI, meskipun dalam UU TNI telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-undang, Namun, keberlakuan ketentuan pasal tersebut ditentukan secara bersyarat, yakni sebagaimana tertuang dalam ketentuan peralihan pada Pasal 74 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Dan ayat (2) nya berbunyi Selama Undang- undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini menunjukkan adanya konflik norma atau disharmonisasi norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer.

Akibat adanya disharmonisasi norma tersebut seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya telah menimbulkan perebutan kewenangan/kompetensi terkait upaya penyidikan, antara lembaga penyidik yang diatur secara limitatif dalam UU TPPU dan lembaga penyidik dalam lingkungan peradilan militer, untuk mengatasinya diperlukan politik hukum terkait permasalahan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum.

Sebenarnya terkait dengan permasalahan yang dibahas pada UU TPPU sudah disebutkan secara jelas bahwa menurut Pasal 1 angka 9 subyek hukum dari UU TPPU adalah setiap orang dimana bisa perseorangan atau korporasi, kemudian dalam rumusan *predicate crime* yang atur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *predicate crime* atau tindak pidana asal dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan penegakkan hukum, khususnya merupakan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis terkandung asas personalitas atau asas kebangsaan dimana menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Prinsip yang diberikan oleh asas kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Yang mana baik warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan warga *(citizens)*, warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan rakyat dari sebuah negara. Oleh karena itu sudah seharusnya tunduk pada ketentuan UU TPPU tersebut, Namun karena dengan masih berlakunya UU Peradilan Militer masih membuka celah hukum adanya perkecualian terhadap pelaku yang berasal dari TNI, oleh karena itu diperlukan sebuah solusi seperti halnya telah disebutkan dalam beberapa Undang-undang, diantaranya adalah:

1. Pasal 49 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Dalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

1. Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

1. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang Ketentuan mengenai :
   1. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni:
      1. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
      2. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
      3. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
      4. melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.
   2. kewenangan perwira penyerah perkara yang:
      1. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
      2. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
      3. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
      4. Memperpanjang penahanan;
      5. Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
      6. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
      7. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
      8. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Dimana dalam ketiga Undang-undang tersebut disebutkan dengan tegas tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU Peradilan Militer, meskipun dalam Undang- undang No. 31 Tahun 1999 pembatasan yang dilakukan sangat minim. Hal ini merupakan upaya yang sesuai dengan politik hukum nasional sebagaimana dikatakan Sudarto, Negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat Negara, ialah Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, setiap lima tahun ditetapkan GBHN oleh MPR, ialah badan yang secara hukum memegang kedaulatan rakyat. Yang mana dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang.

Singkatnya, atas permasalahan yang terjadi yakni konflik norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer yang berdampak adanya perebutan kewenangan dan adanya ketidakpastian hukum, diperlukan jalan keluar yakni politik hukum dalam hal ini politik hukum pidana yang implementasinya dapat melalui kebijakan formulasi di tingkat legislatif dengan cara mereformulasi perUndang-undangan yang ada sebagai bagian dari pembaharuan hukum sehingga celah hukum yang ada dapat ter-*cover*, tentunya disesuaikan dengan politik hukum nasional yang telah digariskan, dalam hal ini adalah TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang secara substantif terkandung paradigma reformasi TNI, dimana mengamanatkan pelanggaran ketentuan pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Dengan demikian dalam kebijakan formulasi yang akan dirumuskan nantinya diperlukan sebuah kepastian hukum dalam perUndang-undangan sehingga dalam konteks permasalahan yang terjadi yakni adanya Undang-undang yang saling kontradiktif antara Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TPPU yang berakibat terjadinya perebutan kewenangan dalam hal penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat teratasi, dengan adanya Undang-undang hasil reformulasi yang lebih mencerminkan kepastian hukum tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dari undang-undang tersebut yang akan membawa kontribusi positif dalam hal penegakkan hukum, dimana di dalam UU TPPU selain mengatur substansi materiil juga mengatur substansi formil dalam hal ini adalah hukum acara yang di dalamnya mengatur secara tegas dan terbatas terkait perangkat hukum yang berkewenangan.

Dengan kebijakan formulasi yang direkomendasikan tersebut akan memberikan kepastian hukum pada hukum acara yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang TPPU sehingga celah hukum dalam permasalahan yang dibahas yakni disharmoniasi norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer dapat teratasi, yang pada akhirnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI khususnya tindak pidana pencucian uang lebih sesuai dengan politik hukum nasional yang sudah digariskan, dengan demikian akan lebih mencerminkan keadilan karena tidak mengenal diskriminasi.

# BAB V KESIMPULAN

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

* + 1. Berdasarkan kajian secara teoritis dalam hal kewenangan, validitas hukum, keadilan berbasis persamaan di hadapan hukum dan juga atas dasar politik hukum negara yang sudah digariskan, sekaligus dilihat dari perspektif prinsip-prinsip yurisdiksi,tindak pidana pencucian uangyang dilakukan olehanggota TNI seharusnya tidak tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer, melainkan tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan umumsebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam UU TPPU, namun hal tersebut masih terdapat kendalayakni dengan masih berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer yang tak kunjung selesai dalam proses revisi nya.
    2. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam *ius constituendum* harus dirumuskan secara lebih tegas dalam UU TPPU, agar tidak membuka ruang adanya penafsiran. Dengan tetap mempertahankan limitasi lembaga yang berwenang dalam hal melakukan penyidikan, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang termasuk kategori tindak pidana umum (non militer), tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan juga penyidikan dilakukan oleh penyidik

dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam ketentuan limitatif.

* + 1. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsurPasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

## Saran

1. Mengenai tindak pidana pencucian uang seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putuhan dalam perkara tindak pidana pencucian yang dalam pemeriksaan *in absentia* seharusnya lebih aktif dalam menggali fakta dan alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sendiri.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan di kalangan anggota TNI maupun calon TNI sebaiknya TNI sebagai organisasi militer Indonesia memberikan lebih banyak informasi mengenai tugas dan resiko yang akan diberikan apabila diterima menjadi anggota TNI, bagi yang telah menjadi anggota TNI diberikan banyak Pembinaan Mental (Bintal) atau Penyuluhan Hukum yang menjangkau daerah militer yang terpencil sekalipun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU BUKU**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2014.

\_\_\_\_\_\_. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana.*Jakarta: Niaga Swadaya. 2018.

Amiroeddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta*:* Balai Pustaka, 2002.

Clifford L. Karcmer dalamPathorangHalim*,Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

E. Utrecht, S.h. *Hukum* Pidana II, Bandung*:* PT Penerbitan Universitas, 1965.

E.Y. Kanter. S.R. Sianturi.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.

Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, dan Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.10, 2010.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mahrus Ali,*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*,Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi,* Jakarta: Kencana, 2007.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, CV. Bandung: Mandar Maju. 2002.

Moch Faisal Salam. *Hukum PIdana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarya: Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro, 1991.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Philips Darwin, *Money Laundering*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.

S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Cet. 2 jakarta: Ahaem Petehaen, 1985.

Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981,

\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Tina Asmarawati. *Pidana Dan Pemindanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan.*Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pusataka Publisher, 2010.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2005.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang PemisahanTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

**C. Internet**

<https://wordpress.com/2016/12/02/asas-asas-dalam-uu-no-8-tahun-2010/>diakses pada tanggal 13 April 2022

Sandro Gatra, Laksono Hari W, 2012, Rekening Gendut Milik TNI Tak Bisa Diproses,[http://nasional.kompas.com/read/2012/02/20/18533186/Rekening.Gendut.Milik. TNI.Tak.Bisa.Diproses,](http://nasional.kompas.com/read/2012/02/20/18533186/Rekening.Gendut.Milik.TNI.Tak.Bisa.Diproses) diakses Pada Tanggal 23 April 2022 pada Pukul 08.49 Wib.

1. M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2014. hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Philips Darwin, *Money Laundering*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012. hal. 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Arief Amrullah, *Op. Cit*. hal. 18-19 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004. hal. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, dan Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. hal. 108-109. [↑](#footnote-ref-5)
6. Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006. hal. 27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. hal. 183 [↑](#footnote-ref-7)
8. Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan.* Yogyakarta: deepublish, 2015, hal. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana .*Jakarta: Niaga Swadaya. 2018, hal. 75 [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S.T. Kansil.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta*:* Balai Pustaka,2002, hal. 257. [↑](#footnote-ref-10)
11. P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang.*Op. Cit*., hal. 179. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tina Asmarawati. *Pidana Dan Pemindanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015,hal. 58 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* hal. 180. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* hal. 181. [↑](#footnote-ref-16)
17. Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2014. hal. 127. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hal. 128 [↑](#footnote-ref-18)
19. E.Y. Kanter. S.R. Sianturi.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta:Storia Grafika, 2012, hal. 252. [↑](#footnote-ref-19)
20. E. Utrecht, S.h. *Hukum Pidana Il.*Bandung**:** PT. Penerbitanuniversitas. 1965, hal. 254. [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hal. 29. [↑](#footnote-ref-21)
22. Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 14. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal 158. [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 20. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro, 1991, hal. 6. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 159 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 20. [↑](#footnote-ref-27)
28. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hal 17-18 [↑](#footnote-ref-28)
29. Barda Nawawi Arief, *op. cit*, hal 23 [↑](#footnote-ref-29)
30. Barda Nawawi Arief, *loc.cit* [↑](#footnote-ref-30)
31. Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2005, hal 18-19 [↑](#footnote-ref-31)
32. Andi Hamzah, *op cit*, hal.12 [↑](#footnote-ref-32)
33. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 2 [↑](#footnote-ref-33)
34. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 69. [↑](#footnote-ref-34)
35. Leden Marpaung, *Op. Cit*. hal 13 [↑](#footnote-ref-35)
36. Mahrus Ali,*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*,Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 146-147 [↑](#footnote-ref-36)
37. Barda Nawawi Arief, , *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 25 [↑](#footnote-ref-37)
38. Clifford L. Karcmer dalamPathorangHalim*,Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Total Media, 2013.hal. 11 [↑](#footnote-ref-38)
39. Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pusataka Publisher, 2010. hal. 193 [↑](#footnote-ref-39)
40. Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hal. 121-122 [↑](#footnote-ref-40)
41. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarya: Pustaka Pelajar, 2010, hal.280 [↑](#footnote-ref-41)
42. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014. hal 19 [↑](#footnote-ref-42)
43. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 87 [↑](#footnote-ref-43)
44. Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003. hal. 13-14 [↑](#footnote-ref-44)
45. Moch Faisal Salam. *Hukum PIdana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006, hal. 26 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid* [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid* [↑](#footnote-ref-47)
48. Amiroeddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta,2006,hal. 5 [↑](#footnote-ref-48)
49. Moch Faisal Salam,*Op.cit*, hal. 29 [↑](#footnote-ref-49)
50. Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*  hal. 25-26. [↑](#footnote-ref-50)
51. Sandro Gatra, Laksono Hari W, 2012, Rekening Gendut Milik TNI Tak Bisa Diproses,[http://nasional.kompas.com/read/2012/02/20/18533186/Rekening.Gendut.Milik. TNI.Tak.Bisa.Diproses,](http://nasional.kompas.com/read/2012/02/20/18533186/Rekening.Gendut.Milik.TNI.Tak.Bisa.Diproses) diakses Pada Tanggal 23 April 2022 pada Pukul 08.49 Wib. [↑](#footnote-ref-51)
52. Wawancara pada tanggal 16 Januari 2022 di medan. [↑](#footnote-ref-52)
53. Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 10. [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Djafar Saidi., *Loc..Cit.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi,* Jakarta: Kencana,2007, Hal. 29. [↑](#footnote-ref-55)
56. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. [↑](#footnote-ref-56)
57. S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Cet. 2 jakarta: Ahaem Petehaen, 1985. hal. 27-29. [↑](#footnote-ref-57)
58. Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hal. 25. [↑](#footnote-ref-58)
59. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.10, 2010. hal. 109. [↑](#footnote-ref-59)
60. Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-60)
61. M. Yahya Harahap, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-61)
62. Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.* hal. 35. [↑](#footnote-ref-62)